

EVALUASI PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI SD NEGERI 009 TENGGARONG DENGAN CIPP MODEL

Descha Rahmadani¹, Rini Dwi Yuliani², Prita Indriawati³, Widyatmike Gede Mulawarman⁴,
Masrur Yahya⁵

SD Negeri 009 Tenggarong¹, MTs Ad Daud Samarinda², Universitas Balikpapan³, Universitas
Mulawarman⁴, Universitas Mulawarman⁵
pos-el: descharahmadani@gmail.com¹, rinidwiyuliani6@gmail.com², prita@uniba-
uniba.ac.id, widyatmike@fkip.unmul.ac.id, masruryahyaalwi@fkip.unmul.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan penerapan sekolah gratis bagi pelaksanaan pendidikan di Indonesia, didukung oleh kebijakan pembiayaan pendidikan yang disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penelitian ini bertujuan mengkaji evaluasi dengan model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Empat aspek utama kajian dari pelaksanaan program pendidikan gratis di SD Negeri 009 Tenggarong meliputi sekolah sebagai pengelola program dapat memperoleh gambaran kondisi awal (konteks), apakah masukan sudah memadai (input), bagaimana pelaksanaan berjalan (proses) dan hasil akhir (produk). Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, orang tua/komite sekolah dengan teknik purposive sampling. Analisis komponen konteks memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung tujuan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Komponen input menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, pendanaan yang cukup memadai, sarana dan prasarana yang cukup, serta dukungan stakeholder, meskipun peningkatan efektivitas penggunaan dana belum signifikan. Komponen proses menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan gratis telah berjalan dengan baik dan ada dukungan partisipatif, meskipun masih menghadapi kendala pada penambahan aspek fasilitas dan ketepatan waktu pencairan dana. Hasil analisis komponen produk menunjukkan bahwa program pendidikan gratis telah memberikan dampak positif terhadap siswa, meningkatkan kepuasan masyarakat, mencapai tujuan pemerataan akses pendidikan, serta memiliki prospek keberlanjutan yang baik, meskipun masih dibutuhkan peningkatan dalam aspek pengawasan, kualitas pembelajaran, dan fasilitas pendukung.

Kata kunci : evaluasi, cipp model, pendidikan gratis

ABSTRACT

The implementation of free schools for education in Indonesia is supported by an education financing policy called the School Operational Assistance (BOS). This study aims to examine the evaluation using the CIPP model developed by Stufflebeam. Four main aspects for the implementation of free education program at SD Negeri 009 Tenggarong include the school as the program manager being able to obtain an overview of the initial conditions (context), whether the input is adequate (input), how the implementation is running (process), and the final results (product). The research subjects are principal, school treasurer, teachers, parents/school committees, with a purposive sampling technique. The analysis of the context component is relevant to the community's needs and supports the goals of equity and improving the quality of education. The input component shows that the program implementation has been supported by competent human resources, adequate funding, sufficient facilities and infrastructure, and stakeholder support, although the increase in the effectiveness of fund use has not been significant. The process component shows that the implementation of the free education program has been running well and there is participatory support, although it still faces obstacles in the addition of facilities and the timeliness of fund disbursement. The results of the product component analysis show that the free education program has had a positive impact on students, increased community satisfaction, achieved the goal of equal access to education, and has good prospects for sustainability, although improvements are still needed in the aspects of supervision, learning quality, and supporting facilities.

Keywords: evaluation, cipp model, free education.

1. PENDAHULUAN

Mengingat pendidikan merupakan suatu kewajiban, maka pemerintah Indonesia menyediakan fasilitas bagi pelaksanaan pendidikan pada masa reformasi, didukung oleh kebijakan pembiayaan pendidikan yang disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Olofinnyi et al., 2021). BOS bertujuan untuk membiayai berbagai item pendidikan kebutuhan atau pembiayaan. Biaya layanan pendidikan yang dihilangkan bervariasi antar negara, termasuk biaya pembelajaran, ujian, buku pelajaran, seragam, dan biaya lainnya(Romlah et al., 2023).

Kebijakan penerapan sekolah gratis bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan untuk mencapai program wajib belajar 9 tahun yang bermutu, dan berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Rismita, 2018) Kebijakan pendidikan oleh pemerintah daerah adalah lebih mungkin untuk berada pada kebijakan yang secara langsung berdampak pada respon positif masyarakat, seperti kebijakan pendidikan gratis (Akhriani, 2017). Kebijakan pendidikan gratis dapat meningkatkan akses yang adil terhadap layanan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Kebijakan pendidikan gratis di sekolah dasar mempengaruhi dua faktor dominan dalam pemerataan Pendidikan (Khaksar et al., 2023). Ketika pendidikan digratiskan, pemerintah mungkin menghadapi kendala anggaran, yang berpotensi menyebabkan sekolah kekurangan dana dan guru kelebihan beban. Pendidikan gratis memastikan lebih banyak siswa dapat tetap bersekolah tanpa gangguan akibat biaya sekolah (Shehada, 2024).

Kebijakan pendidikan gratis mengurangi hambatan finansial, memungkinkan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah untuk bersekolah tanpa beban biaya sekolah, yang pada

gilirannya meningkatkan angka pendaftaran dan mengurangi angka putus sekolah (Hamid et al., 2023). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke pendidikan dasar dengan menghapuskan biaya sekolah, sehingga memungkinkan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah untuk bersekolah. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut menemui kendala yang signifikan, terutama di wilayah seperti Kotamadya Temeke, di mana tantangan sosial ekonomi sangat menonjol (Mbeya & Mwila, 2024).

Kebijakan pelaksanaan program sekolah gratis ditujukan untuk menghilangkan kendala biaya pendidikan dan meningkatkan akses, partisipasi, dan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah (Warju, 2019). Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penentuan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan (Annur et al., 2025). Evaluasi pelaksanaan manajemen keuangan dalam Program Sekolah Gratis sangat penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses penganggaran, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam manajemen keuangan sekolah (Chanda Chansa Thelma et al., 2024).

Terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar, menurut Chanda et al., (2024) pendidikan gratis memberikan kontribusi langsung ke 1) peningkatan kompetensi guru, 2) pengembangan kurikulum yang berdaya saing global, 3) pengembangan kurikulum dengan pendidikan karakter berbasis iman, 4) muatan lokal bahasa dan budaya, 5) pembelajaran bervariasi yang berpusat pada siswa, 6) Tersedianya sumber belajar yang relevan, komprehensif dan bahan ajar yang kompetitif, dan 7) kelayakan dan

kenyamanan sarana pembelajaran. Penyediaan pendidikan gratis merupakan langkah penting menuju terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana semua individu memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka terlepas dari keadaan keuangan mereka. Pendidikan gratis mendorong kesetaraan dan inklusivitas, mendorong kohesi sosial, dan menyediakan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mencapai potensi akademik mereka (Hasnadi, 2021). Kebijakan pendidikan gratis telah memberikan akses yang lebih merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, beberapa faktor yang berkaitan dengan keberadaan kebijakan pendidikan gratis menjadi tantangan bagi pemerataan akses ke semua sekolah dasar dan menengah yang berkualitas. Kualitas pendidikan secara keseluruhan juga meningkat seiring dengan meningkatnya alokasi dana pemerintah untuk meningkatkan.

Dengan program ini, diharapkan angka partisipasi sekolah meningkat, angka putus sekolah menurun, dan kualitas pendidikan dapat lebih merata di seluruh wilayah (Annur et al., 2025). Melalui evaluasi dengan model CIPP, pembuat kebijakan dan pengelola program dapat memperoleh gambaran tidak hanya dari hasil akhir (produk) tetapi juga kondisi awal (konteks), apakah masukan sudah memadai, dan bagaimana proses pelaksanaan berjalan. Dengan demikian, evaluasi dapat menjadi alat untuk pengambilan Keputusan untuk memperbaiki desain program, mengalokasikan input lebih tepat, memperkuat proses, dan akhirnya meningkatkan outcome.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada SD Negeri 009 Tenggarong pada bulan Oktober tahun 2025 dengan jumlah informan sebanyak 6 orang yg terdiri dari

2 wali murid, 2 guru, 1 bendahara, 1 kepala sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang pelaksanaan, kendala, dan dampak program pendidikan gratis secara kontekstual dan holistik. Menurut Sugiyono, (2022), penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna di balik fenomena sosial yang muncul melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Selain itu, Moleong (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berupaya memahami pengalaman, tindakan, serta persepsi manusia dalam konteks alami melalui deskripsi kata dan bahasa. Oleh karena itu, model CIPP digunakan untuk mengevaluasi empat aspek utama: konteks, masukan, proses, dan produk dari pelaksanaan program pendidikan gratis di SD Negeri 009 Tenggarong Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, orang tua/komite sekolah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung dan relevansi mereka terhadap implementasi program pendidikan gratis. Untuk menjamin objektivitas, data dikumpulkan melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu (Sugiyono, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Context

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, komponen konteks dalam evaluasi program menunjukkan bahwa keberadaan program

pendidikan gratis sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dari aspek kebutuhan program para orang tua menyampaikan bahwa program ini meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya bagi mereka yang sebelumnya mengalami kesulitan memenuhi pembiayaan pendidikan karena mempunyai tanggungan kebutuhan rumah tangga lainnya. Selanjutnya, dari aspek tujuan program, kebijakan ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjamin pemerataan kesempatan belajar serta memastikan kesetaraan di antara siswa, di mana setiap peserta didik memperoleh dukungan dasar yang sama tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Dari segi kesesuaian dengan kebutuhan, program ini dianggap tepat sasaran karena mengurangi beban pembiayaan sekolah. Selanjutnya dana bantuan pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat menutupi biaya operasional dasar. Dengan demikian, siswa dapat bersekolah tanpa dikenakan beban pembiayaan sekolah seperti iuran bulanan, dan pembelian buku. Kondisi ini memastikan bahwa faktor ekonomi tidak lagi menjadi hambatan bagi anak untuk bersekolah. Sementara itu, dalam aspek harapan masyarakat, program ini terus dilanjutkan karena telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan, ketersediaan fasilitas belajar, dan penuntasan wajib belajar 12 tahun. Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, program ini juga memberikan rasa aman secara finansial, karena anak-anak mereka dapat bersekolah tanpa beban biaya dan lebih fokus pada proses pembelajaran.

Secara keseluruhan, hasil analisis komponen konteks menunjukkan bahwa program ini memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung tujuan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Hasil temuan (Akhriani, 2017) terkait Program Pendidikan Gratis di Balangan Kalsel

mengindikasikan bahwa para orang tua memiliki kebutuhan yang tinggi akan dukungan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak mereka. Pembiayaan meliputi komponen biaya pendidikan, seperti pembayaran SPP, pengadaan seragam, buku pelajaran, perlengkapan sekolah, serta pemberian honor bagi guru non-ASN.

Input

Komponen input dalam evaluasi program pendidikan gratis mencakup empat aspek utama, yaitu sumber daya manusia, dana dan anggaran, sarana dan prasarana, serta dukungan pihak terkait. Dari aspek sumber daya manusia, pelaksanaan program menunjukkan keterlibatan aktif seluruh elemen sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai manajer yang melakukan koordinasi dengan guru, staf administrasi, komite sekolah, serta pengawas dari dinas pendidikan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan sekolah gratis di dimulai dengan perencanaan anggaran yang melibatkan kepala sekolah tim pengelola (guru) dan bendahara (Annur et al., 2025). Bentuk dukungan program pembiayaan gratis yang dilakukan para guru yakni melaksanakan pembelajaran dan bimbingan kepada siswa, memberikan informasi mengenai pelaksanaan program, serta berperan dalam pemantauan kehadiran dan prestasi siswa sebagai bagian dari evaluasi keberhasilan program.

Pada aspek dana dan anggaran, hasil wawancara menunjukkan bahwa dana yang tersedia dinilai cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program sekolah gratis, terutama untuk kebutuhan rutin seperti pengadaan buku, alat tulis, dan pemeliharaan sarana prasarana. Pengelolaan dana dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang

telah disepakati. Setiap pengeluaran dicatat dan dipertanggungjawabkan secara terbuka untuk mendukung kegiatan pembelajaran siswa. Dari sisi sarana dan prasarana, kondisi fasilitas sekolah secara umum dinilai cukup menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dukungan dana operasional memungkinkan sekolah melakukan pemeliharaan fasilitas dan penyediaan kebutuhan belajar dasar bagi seluruh siswa. Meskipun demikian, pihak sekolah tetap berupaya menjaga efisiensi penggunaan anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh peserta didik.

Sementara itu, dalam aspek dukungan pihak terkait, ditemukan bahwa peran orang tua dan masyarakat sangat signifikan. Orang tua yang tergabung dalam komite sekolah berperan aktif dalam membantu pengawasan, memberikan masukan terkait kebutuhan siswa, serta memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik dan transparan. Masyarakat turut memberikan dukungan moral dan motivasi kepada anak-anak agar tetap bersemangat bersekolah. Bentuk dukungan sosial ini berkontribusi positif dalam menciptakan iklim sekolah yang kondusif dan memperkuat keberlanjutan program pendidikan gratis. Secara keseluruhan, hasil analisis komponen input menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, pendanaan yang memadai, sarana dan prasarana yang cukup, serta dukungan masyarakat yang kuat, meskipun peningkatan efektivitas pengawasan dan optimalisasi penggunaan dana masih diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal.

Process

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan program pendidikan gratis menunjukkan bahwa proses implementasi telah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, keterlibatan partisipatif, dan

akuntabilitas publik. Dari aspek pelaksanaan program, sekolah melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Program diawali dengan sosialisasi kepada siswa, orang tua, dan guru mengenai ketentuan serta manfaat program. Selanjutnya dilakukan pendataan dan verifikasi peserta didik yang berhak menerima bantuan. Pengelolaan dana bantuan dilakukan secara terstruktur oleh bendahara dan staf administrasi dengan mengacu pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun berdasarkan kebutuhan prioritas pembelajaran. Dana utama bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program bantuan lain yang relevan. Namun dalam implementasi BOS masih perlu perbaikan, menurut (Ninghardjanti et al., 2023) Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu program pemerintah Indonesia yang berorientasi pada pendidikan berkelanjutan, sebelum adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang bertujuan untuk mendukung sekolah dalam mengoptimalkan proses pembelajaran. Namun, karena pengelolaan anggaran yang kurang efektif, program BOS dinilai belum berhasil secara maksimal dalam mewujudkan pemerataan pendidikan.

Prinsip transparansi diwujudkan melalui pelaporan penggunaan dana secara terbuka, baik melalui papan informasi maupun rapat komite sekolah. Dari sisi kendala pelaksanaan, beberapa hambatan masih ditemukan dalam proses implementasi, antara lain keterbatasan fasilitas pendukung, seperti alat peraga pembelajaran dan sarana multimedia yang belum memadai, serta keterlambatan pencairan dana bantuan yang berpengaruh terhadap efektivitas kegiatan belajar. Selain itu, sebagian kebutuhan sekolah, khususnya terkait pemeliharaan sarana prasarana yang rusak, belum sepenuhnya tercakup dalam alokasi anggaran. Meskipun demikian, pihak sekolah terus melakukan penyesuaian dan optimalisasi

agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan secara efisien. Senada dengan studi dari (Asim et al., 2019) tanpa adanya perencanaan dan penyesuaian model input program pendidikan gratis yang tepat, kebijakan tersebut dapat menyebabkan ekspansi pendidikan yang tidak merata dan tidak berkeadilan, kekurangan sumber daya yang kronis, serta penurunan kualitas dan hasil belajar.

Dalam aspek partisipasi stakeholder, keterlibatan orang tua, guru, dan masyarakat terlihat cukup tinggi. Orang tua, melalui komite sekolah, berperan aktif dalam memantau pelaksanaan program, memberikan dukungan moral kepada anak-anak agar tetap semangat belajar, serta turut menyebarkan informasi dan memberikan masukan kepada pihak sekolah. Guru dan tenaga kependidikan berkontribusi dalam proses pembelajaran, memberikan bimbingan, serta ikut berpartisipasi dalam monitoring kehadiran dan prestasi siswa. Komite sekolah dan masyarakat juga berperan sebagai mitra strategis dalam menciptakan iklim sekolah yang kolaboratif.

Sementara itu, dari aspek pengawasan dan evaluasi, sekolah melaksanakan kegiatan evaluasi secara berkala melalui rapat koordinasi yang melibatkan tim manajemen sekolah, guru, komite sekolah, dan pengawas dari dinas pendidikan. Evaluasi dilakukan dengan tujuan meninjau efektivitas pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah perbaikan dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan program ke depan. Setiap penggunaan dana dipantau dan dilaporkan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas publik, dan dipastikan tidak ada pungutan biaya kepada siswa. Dalam penelitian (Rismita, 2018b) pada tahap hasil (*result stage*), tingkat implementasi dan capaian evaluasi pendidikan gratis pada kategori sedang, karena masih terdapat sekolah yang menerapkan pungutan biaya yang justru membebani

orang tua, padahal dalam program sekolah gratis tidak diperbolehkan adanya pungutan tambahan.

Secara keseluruhan, hasil analisis komponen proses menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan gratis di SD Negeri 009 Tenggarong telah berjalan dengan baik dan partisipatif, meskipun masih menghadapi kendala pada aspek fasilitas dan ketepatan waktu pencairan dana. Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan menjadi faktor utama yang memperkuat efektivitas pelaksanaan program di sekolah.

Product

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan gratis memberikan dampak yang signifikan terhadap siswa, orang tua, serta keberlanjutan layanan pendidikan di sekolah. Dari aspek dampak terhadap siswa, program ini terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar, kehadiran, serta partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Data sekolah menunjukkan bahwa jumlah peserta didik terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Siswa juga merasakan manfaat besar dari adanya program ini karena dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya, sehingga mereka lebih fokus dan bersemangat dalam belajar. Program ini turut berkontribusi dalam pemerataan kesempatan pendidikan dan menciptakan generasi muda yang lebih cerdas, berkarakter, serta memiliki semangat belajar yang tinggi.

Dari sisi kepuasan pengguna, baik orang tua maupun masyarakat menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat positif terhadap kualitas layanan pendidikan dan lingkungan sekolah. Program pendidikan gratis dianggap sangat membantu dalam meringankan beban ekonomi keluarga karena orang tua dapat mengalokasikan dana untuk kebutuhan rumah tangga lainnya. Transparansi pengelolaan dana bantuan

juga menciptakan rasa percaya dan kenyamanan di kalangan masyarakat serta lingkungan belajar yang lebih layak bagi siswa. Meskipun demikian, masih terdapat harapan agar sekolah terus berupaya meningkatkan mutu pembelajaran dan fasilitas pendidikan guna mencapai hasil yang lebih optimal.

Pada aspek capaian tujuan program, temuan lapangan menunjukkan bahwa program ini berhasil menghilangkan hambatan biaya dalam penyelesaian pendidikan, sehingga siswa memiliki kepercayaan diri untuk menuntaskan studi tanpa kekhawatiran terkait pembayaran uang sekolah maupun sumbangan wajib. Terdapat pula peningkatan pada aspek prestasi belajar, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal kualitas hasil belajar. Secara umum, tujuan utama program untuk memperluas akses pendidikan yang merata telah tercapai dengan baik. Keberhasilan efektifitas suatu program sekolah gratis dipengaruhi beberapa faktor seperti pemerataan akses, alokasi sumber daya, dan implementasi pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya program ini memiliki tantangan seperti infrastruktur tidak memadai, minimnya peralatan pendidikan and minimnya pelatihan guru, sehingga berdampak pada nutu pendidikan (Chanda Chansa Thelma et al., 2024).

Sementara itu, dari aspek keberlanjutan program, pelaksanaan program pendidikan gratis di SD Negeri 009 Tenggarong dinilai memiliki potensi keberlanjutan yang tinggi. Namun perlu dilakukan upaya menuju pendidikan gratis disertai dengan ketersediaan sumber daya yang memadai, pengelolaan yang efektif, serta komitmen terhadap peningkatan secara berkelanjutan (Chanda Chansa Thelma et al., 2024). Komitmen pemerintah dalam menyediakan tambahan anggaran serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Selain itu, adanya dukungan berkelanjutan dari masyarakat dan komite sekolah memperkuat fondasi program

agar tetap berjalan secara efektif. Namun demikian, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan evaluasi agar pelaksanaan program ke depan dapat lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Hal ini sejalan dengan temuan (Romlah et al., 2023) (Chanda Chansa Thelma et al., 2024) kebijakan sekolah gratis telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan dan sarana sekolah, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dalam mendukung peningkatan standar mutu pendidikan.

Dalam konteks SD Negeri 009 Tenggarong secara keseluruhan, hasil analisis komponen produk menunjukkan bahwa program pendidikan gratis telah memberikan dampak positif terhadap siswa, meningkatkan kepuasan masyarakat, mencapai tujuan pemerataan akses pendidikan, serta memiliki prospek keberlanjutan yang baik, meskipun masih dibutuhkan peningkatan dalam aspek pengawasan, kualitas pembelajaran, dan fasilitas pendukung.

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, hasil analisis komponen konteks menunjukkan bahwa program ini memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung tujuan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Hasil analisis komponen input menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, pendanaan yang cukup memadai, sarana dan prasarana yang cukup, serta dukungan masyarakat yang baik, meskipun peningkatan efektivitas pengawasan dan optimalisasi penggunaan dana masih diperlukan untuk mencapai hasil yang belum optimal. Komponen proses menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan gratis telah berjalan dengan baik dan

partisipatif, meskipun masih menghadapi kendala pada aspek fasilitas dan ketepatan waktu pencairan dana. Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan menjadi faktor utama yang memperkuat efektivitas pelaksanaan program di sekolah. Hasil analisis komponen produk menunjukkan bahwa program pendidikan gratis telah memberikan dampak positif terhadap siswa, meningkatkan kepuasan masyarakat, mencapai tujuan pemerataan akses pendidikan, serta memiliki prospek keberlanjutan yang baik, meskipun masih dibutuhkan peningkatan dalam aspek pengawasan, kualitas pembelajaran, dan fasilitas pendukung.

Ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup satu wilayah dan satu jenis program pendidikan gratis di satu sekolah, sehingga temuan pada penelitian ini belum sepenuhnya dapat digeneralisasikan pada wilayah lain atau pada program pendidikan gratis dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian juga menyebabkan analisis terhadap keberlanjutan program dan efektivitas pengawasan belum dapat dilakukan secara komprehensif. Oleh karena itu, dinas pendidikan sebagai pengambil kebijakan diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program pendidikan gratis, khususnya terkait pengelolaan dan pemanfaatan anggaran agar lebih efektif, tepat sasaran, dan transparan. Selanjutnya, penelitian mendatang disarankan untuk dapat memperluas area kajian serta melibatkan lebih banyak satuan pendidikan guna meningkatkan validitas eksternal dan daya generalisasi hasil penelitian.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akhriani. (2017). Program Evaluation of the Free Education in Balangan Regency. *JISAE: Journal of Indonesian Student Assessment and Evaluation*, 3(2), 22–33. <https://doi.org/10.21009/jisae.v3i2.4384>
- Annur, S., Afriantoni, A., & Rini, A. W. (2025). Evaluation of the Implementation of School Financial Management in the Free School Program Using the Stake Model at Senior High School. *Journal Evaluation in Education (JEE)*, 6(2), 302–312. <https://doi.org/10.37251/jee.v6i2.1298>
- Asim, S., Chugunov, D., & Gera, R. (2019). Fiscal Implications of Free Education. *Fiscal Implications of Free Education*, May 2018, 1–18. <https://doi.org/10.1596/31466>
- Chanda Chansa Thelma, Daniel L. Mpolomoka, Mwila Mwenda Gilbert, Daniel Monta Mulenga, & Zohaib Hassan Sain. (2024). Free Education vs. Quality Education: A systematic analysis. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 23(1), 2934–2946. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.23.1.2306>
- Hamid, A., Latif, A., & Mulyati, M. (2023). Mengurai Tata Kelola Pembiayaan Pendidikan menyongsong Transformasi Pendidikan. *Journal of Contemporary Education in Islamic Society*, 1(19), 30–45. <https://doi.org/10.47466/interstudia>
- Hasnadi, H. (2021). Total Quality Management: Konsep Peningkatan Mutu Pendidikan. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 6(2). <https://doi.org/10.30998/sap.v6i2.9331>
- Khaksar, M., Kiany, G. R., & Shayestefar, P. (2023). *Research Quarterly Using a CIPP-Based*

- Model for Evaluation of Teacher Training Programs in a Private-sector EFL Institutes.* 38, 65–91.
- Mbeya, E. M., & Mwila, P. M. (2024). Evaluating the Implementation and Impact of Fee-Free Education Policy in Temeke Municipality: Challenges and Opportunities. *Contemporary Research Analysis Journal*, 01(06), 195–201.
<https://doi.org/10.55677/craj/05-2024-vol01i6>
- Ninghardjanti, P., Murtini, W., Hindrayani, A., & Sangka, K. B. (2023). Evaluation of the Smart Indonesia Program as a Policy to Improve Equality in Education. *Sustainability (Switzerland)*, 15(6).
<https://doi.org/10.3390/su15065114>
- Olofinniyi, O. ., G.B., G. B., Meseiko, S. A., Temaugee, S. T., Agada, E. J., & Ocheido, S. (2021). Family Socio-Economic Status in Relation to Free Education Programme: The Implication on Student's Academic Achievement in Public Secondary Schools in South-West Nigeria. *SSRN Electronic Journal*, 9(3), 55–68.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3814154>
- Rismita. (2018a). The Implementation of Tuition-Free School Policy Using Stake's Countenance Evaluation Model. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 174(Ice 2017), 514–517.
- Rismita, -. (2018b). *The Implementation of Tuition-Free School Policy Using Stake's Countenance Evaluation Model*. 174(Ice 2017), 514–517.
<https://doi.org/10.2991/ice-17.2018.110>
- Romlah, S., Imron, A., Maisyaroh, Sunandar, A., & Dami, Z. A. (2023). A free education policy in Indonesia for equitable access and improvement of the quality of learning. *Cogent Education*, 10(2).
<https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2245734>
- Shehada, M. (2024). *Free Education : A Strategic Solution to Reduce School Dropout Rates in Indonesia*. 2000.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Warju, W. (2019). *Educational Program Evaluation using CIPP Model*. November.
<https://doi.org/10.17509/invotec.v12i1.4502>